

BAB I

PENDAHULUAN

A. JUDUL

“PENOKOHAN GBPH PRABUKUSUMO DI SKH KEDAULATAN RAKYAT”

(Analisis Framing Terhadap Berita Pengunduran Diri Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Koran Harian Kedaulatan Rakyat)

B. Latar Belakang

Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo (GBPH Prabukusumo) merupakan salah satu putra dari alm. Sri Sultan HB IX, juga merupakan adik dari Sri Sultan HB X yang saat ini sebagai raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kiprah politik, GBPH Prabukusumo pernah menjabat sebagai Ketua AMPI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia) dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi DIY.

GBPH Prabukusumo menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY sejak awal berdirinya Partai Demokrat yaitu tahun 2003. Saat itu partai masih di bawah kepemimpinan Hadi Utomo. Penunjukan GBPH Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY selain beliau merupakan kerabat Keraton Yogyakarta (adik Sri Sultan HB X), beliau dinilai mempunyai pengaruh di wilayah DIY. Sehingga pada pemilu 2009 lalu, Prabukusumo berjasa mengantarkan Partai Demokrat meraih kemenangan di wilayah Yogyakarta.

Namun pada akhir bulan Desember 2010 yang lalu GBPH Prabukusumo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat juga sekaligus keluar dari keanggotaan partai yang dipimpin SBY itu. Adik Sri Sultan HB X ini resmi mengundurkan diri dari

jabatannya selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 2010, Prabukusumo juga menyerahkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Demokrat yang akan diserahkan di Kantor DPD Partai Demokrat DIY Jalan Kol Sugiono,

"KTA saya akan saya serahkan kepada orang yang paling saya percaya dan menjadi panutan kami selama ini di jajaran DPD Partai Demokrat DIY, dan nanti pengurus daerah yang akan mengembalikan KTA saya ke pusat," katanya. (Kedaulatan Rakyat, 9 Desember 2010)

Pengunduran diri Prabukusumo tersebut dikarenakan adanya perbedaan pemahaman tentang Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebab Prabukusumo merasa berkewajiban untuk menjaga dan melaksanakan Amanat 5 September 1945, yakni menyerahkan kekuasaan *nagari dalem* ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya harus menjaga harga diri almarhum ayahanda, dan Sri Paduka Paku Alam VIII, sebagaimana yang tertuang dalam Amanat 5 September 1945, yakni menyerahkan kekuasaan nagari dalem ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga tidak mungkin saya mengkhianati ayahanda," paparnya. (Kedaulatan Rakyat, 9 Desember 2010)

Selain itu Prabukusumo mengaku kecewa terhadap Partai Demokrat terkait dengan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta.

"Saya bersyukur telah keluar dari partai itu," kata adik Sultan Hamengku Buwono X ini. "Waktu kampanye SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) mengatakan Yogyakarta istimewa," katanya. "Saya tidak mau jadi durhaka, kalau ada yang menginjak-injak sejarah, harus saya perjuangkan." (Kedaulatan Rakyat, 13 Desember 2010)

Keistimewaan yang dimaksud selain penambahan nama menjadi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta juga sistem pemerintahannya pun berbeda. Jika kota-kota lain di Indonesia, pemimpin atau orang yang bertanggung jawab terhadap suatu daerah dipimpin oleh Gubernur, yang dahulu dipilih oleh Pemerintah atau saat ini melalui PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah),

maka di Yogyakarta yang menjadi pemimpinnya adalah sultan yang ditetapkan secara langsung bukan melalui pemilihan.

Sultan atau raja yang memerintah Yogyakarta sudah turun menurun semenjak Sri Sultan HB I sampai saat ini dijabat oleh Sri Sultan HB X. Permasalahannya adalah, semenjak masa reformasi muncul sistem yang demokratis, yaitu setiap pemimpin daerah harus dipilih melalui suatu pemilihan, bukan ditentukan oleh pemerintah pusat. Persoalan semakin rumit karena warga Yogyakarta menolak cara tersebut. Mereka menghendaki bahwa pemimpin mereka hanyalah Sultan. Bagi mereka, sultan dalam adat Jawa merupakan pemangku kosmas atau pusat. Sultan bukan hanya merupakan sekedar sosok penguasa dengan otoritas sekuler yang luas. Kedudukan Sultan bukan hanya dalam arti badani, namun sekaligus sebagai emanansi dari kekuatan transcendental tertentu. Kekuatan transcendental itu berfungsi sebagai saka guru masyarakat. Khususnya penjaga nilai-nilai keutamaan Jawa (Nurinwa,2003:2)

Inti dari persoalan ini adalah warga Yogyakarta tidak menginginkan pemimpin lain yang memimpin Yogyakarta selain Sultan itu sendiri. Substansi keistimewaan DIY dapat dilihat secara nyata pada empat bidang penting, yaitu bidang politik, pemerintahan, kebudayaan, dan pertahanan, termasuk tata ruang. Di bidang politik dan pemerintahan, draf RUUK menegaskan pengakuan secara legal posisi Kesultanan dan Pura Pakualaman sebagai warisan budaya bangsa. DIY juga diusulkan memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. Adanya pengintegrasian Kesultanan dan Pakualaman, ke dalam struktur Pemerintahan Provinsi DIY dilakukan melalui pemberian wewenang, berikut implikasi-implikasi yang melekat didalamnya kepada Sultan dan Pakualam sebagai satu kesatuan politik yang diposisikan sebagai Papardhya Keistimewaan. Dalam bidang kebudayaan, Papardhya memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus pelestarian, serta pembaharuan asset dan nilai-nilai budaya Jawa pada umumnya, dan Yogyakarta khususnya. Sedangkan kewenangan dalam

bidang pertanahan diwujudkan melalui pengakuan secara khusus, status hukum Kasultanan dan Pakualaman sebagai badan hukum kebudayaan yang memiliki hak kepemilikan atas tanah dan aset lainnya.

Keraton lebih mengedepankan bahwa persoalannya bukan masalah demokrasi atau bukan, monarki atau bukan tetapi ada faktor sejarah dan sosial-budaya mengapa DIY sebagai daerah istimewa dan Sultan menjadi gubernur. Hal itu merupakan suatu kesepakatan politik dan sosial-budaya pada masa kepemimpinan Sultan HB IX dengan presiden Soekarno. Dalam menanggapi polemik ini Sultan HB X mempunyai sikap yang bijak dan tidak terpengaruh dengan memanasnya suhu politik antara Keraton dan Istana. Upaya yang dilakukan pihak keraton dan warga Yogyakarta pun sudah tepat dengan mengedepankan sisi kearifan lokal dan kesantunan dalam berpendapat itulah demokrasi sejati. (Kedaulatan Rakyat, 14 Desember 2010)

Akan tetapi, meskipun dapat dibilang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) masih pada tahap awal, tapi sudah menuai banyak protes dari berbagai kalangan. Ada yang menganggap bahwa RUUK DIY tersebut dapat membuat keistimewaan Yogyakarta menjadi luntur bahkan menghilang.

Pengunduran diri GBPH Prabokusumo dari jabatan sebagai ketua DPD Partai Demokrat (PD) DIY telah memperpanjang barisan polemik persetujuan RUUK DIY antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah. Yang menjadi pemicu awal kontroversi RUUK adalah dari pemerintah tetap menghendaki untuk melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah sebagai mekanisme yang demokratis. Peristiwa pengunduran Gusti Prabu merupakan pukulan telak bagi Partai Demokrat (PD). Partai yang dibina oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tampaknya mempunyai citra yang buruk di mata masyarakat Yogyakarta dan tidak lagi mendapatkan tempat terutama di hati keluarga keraton.

Asumsi dasar yang menjadi alasan kuat mengapa penetapan bukanlah opsi yang tepat dari pihak Istana karena ada tiga alasan utama yang melatarbelakangi yaitu *Pertama*, mekanisme penetapan cenderung tidak konsisten dan sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. *Kedua*, Istana tidak menginginkan dicap oleh masyarakat internasional, lembaga tink-tank demokrasi, dan makelar demokrasi sebagai negara demokrasi setengah hati, karena di dalam negara tersebut masih ada sistem monarki seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Anggapan inilah yang dipegang oleh pihak Istana untuk tetap bersikukuh menerapkan mekanisme pemilihan di dalam RUUK DIY daripada penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah. *Ketiga*, Sultan sebagai raja sekaligus sebagai gubernur pada pemerintahan modern dinilai tidak pas dan tidak tepat karena tidak seharusnya seorang raja menjabat atau menduduki jabatan pemerintahan modern. Dualisme kepemimpinan di dalam pemerintahan modern dinilai sangat rancu dan tidak mempunyai dasar nalar publik untuk memperkuat argumen Istana yang mengklaim bahwa Indonesia adalah negara paling demokratis di dunia dengan dipimpin oleh partai demokrat. Alasan tersebut yang membawa mengapa RUUK DIY sampai hari ini masih menjadi perdebatan dan tarik ulur di tingkat pemerintahan pusat. (Kedaulatan Rakyat, 14 Desember 2010)

Pengunduran diri Prabukusumo sebagai Ketua DPD dan keanggotaanya di Partai Demokrat dinilai oleh beberapa kalangan karena beliau merupakan adik dari Sri Sultan HB X yang merupakan Gubernur DIY saat ini serta adanya bujukan dari keluarga Keraton Yogyakarta untuk meninggalkan Partai Demokrat yang dinilai tidak mendukung RUUK DIY. Namun hal tersebut dibantah oleh GBPH Prabukusumo, bahwa pengunduran dirinya murni datang dari hati nurani tanpa ada tekanan dari pihak mana pun termasuk Sri Sultan HB X atau pun keluarga Keraton Yogyakarta.

Pengunduran diri Prabukusumo dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat (PD) DIY menunjukkan bahwa keluarga Kraton Yogyakarta punya integritas yang sama dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY. Meski berbeda partai politik, namun menyangkut keistimewaan DIY, kerabat Keraton Yogya tetap satu suara. (Kedaulatan Rakyat, 10 Desember 2010).

Tidak hanya itu, pengunduran diri Pabukusumo juga diikuti pula oleh dua pengurus DPD Partai Demokrat lainnya, yaitu Drs. Faraz Umayana dan Lulu D Budihardjo (wakil sekretaris bidang IX) yang resmi mengundurkan diri dengan menyerahkan KTA pada tanggal 9 Desember 2010. Keputusan ini merupakan buntut dari sikapnya yang menolak usulan pemerintah memisahkan jabatan Gubernur DIY dari Sultan yang dituangkan dalam draf [RUU Keistimewaan Yogyakarta](#). Namun adik Sri Sultan HB X itu menegaskan, tidak pernah mengajak atau mempengaruhi anggota dan pengurus Partai Demokrat untuk melakukan hal serupa (mengundurkan diri). Seperti berita yang dikutip dari SKH Kedaulatan Rakyat 10 Desember 2010 berikut :

"Saya tidak mengajak siapapun. Karena nanti akan menjadi beban moral," ujar Prabukusumo. Keputusan Prabukusumo ini tak urung membuat Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum terkaget-kaget dan masih menunggu perkembangan soal kepastian langkah Prabu yang mundur dari Partai Demokrat.

Alasan lain mundurnya Prabukusumo dari Partai Demokrat dikarenakan dirinya merasa sakit hati atas ucapan salah satu pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul dan pengurus lainnya terkait dengan istilah darah biru serta dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang cenderung berubah-ubah. Dan menanggapi sejumlah respon bernada miring yang ditujukan terhadap keputusan pengunduran diri DPD Partai Demokrat DIY, Prabukusumo menyatakan tidak keberatan dengan semua itu.

Sementara itu terkait dengan pengunduran diri Prabukusumo, Partai Demokrat tetap optimis tidak akan menurunkan suara Demokrat di DIY. Hal itu akan mematahkan anggapan bahwa kemenangan yang diperoleh Partai Demokrat pada pemilu 2009 karena adanya pengaruh Prabukusumo yang menjabat sebagai ketua DPD Partai Demokrat di DIY. Selain itu Partai Demokrat juga menyatakan bahwa tidak ada perpecahan di tubuh Partai Demokrat, bahkan menjamin bahwa Demokrat akan semakin solid di wilayah DIY.

Sedang menurut pengamat politik LIPI Lili Romli, pengunduran diri Prabukusumo bisa menjadi bahan evaluasi. Pengunduran diri tersebut dapat dimaknai sebagai refleksi apakah sikap Demokrat yang mendukung pemilukada gubernur di DIY perlu dipertahankan atau tidak. (Kedaulatan Rakyat, 10 Desember 2010)

Peneliti tertarik untuk melihat citra Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo pasca pengunduran diri sebagai ketua DPD Partai Demokrat DIY juga keanggotaannya di Partai Demokrat. GBPH Prabukusumo tidak hanya dianggap sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY namun beliau telah berjasa menghantarkan Partai Demokrat mendapatkan suara terbanyak di wilayah DIY pada pemilu 2009, mengingat waktu itu Partai Demokrat termasuk partai politik yang masih baru. Selain itu perlu diingat juga bahwa GBPH Prabukusumo juga merupakan adik dari Sri Sultan HB X yang saat ini menjabat sebagai Gubernur DIY.

Pengunduran diri GBPH Prabukusumo sebagai ketua DPD sekaligus keanggotaannya Partai Demokrat DIY merupakan akumulasi kekecewaan terhadap Partai Demokrat dikarenakan adanya perbedaan pemahaman tentang Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu Partai Demokrat terkesan *cuek* dan tidak peduli terhadap permasalahan RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Peristiwa ini dianggap penting oleh media, baik lokal maupun nasional. Hal ini dikarenakan Yogyakarta adalah salah satu kota besar di Indonesia dan memegang peranan

penting dalam kancah pemerintahan. Selain itu, isu yang diangkat dalam permasalahan ini bukan hanya menyangkut pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat, namun juga masalah konsistensi Partai Demokrat terhadap komitmen saat kampanye yang akan mendukung RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Berdasarkan ilustrasi dari SKH Kedaulatan Rakyat di atas, maka penulis mencoba mengkaji lebih dalam bagaimana SKH Kedaulatan Rakyat membingkai realita yaitu tentang sosok Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo. Dalam memberitakan sosok GBPH Prabukusumo pasca pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD dan juga keanggotaannya di Partai Demokrat sudah tentu dipersepsikan secara berbeda-beda oleh insan pers. Ada yang menonjolkan sisi-sisi positif dari, dari sosok GBPH Prabukusumo, ada pula yang mengekspos sisi negatif dari Prabukusumo. Sorot media terhadap realitas berbeda-beda bergantung pada sisi mana yang menarik menurut perspektif media. Namun perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: organisasi media, ideologi media, kebijakan redaksional dan lain-lain.

Kepentingan politik dengan mudah juga dapat dilihat dari penonjolan berita-berita yang baik-baik tentang tokoh-tokoh politik atau pejabat yang dipandang menguntungkan pemilik media. Sementara berita-berita lain kurang ditonjolkan meskipun substansinya lebih dibutuhkan oleh masyarakat luas. Penonjolan berita biasanya dilakukan dengan menjadikannya sebagai *headline* halaman depan, diberitakan dengan lebih lengkap, dan sebagainya. Berita yang ditampilkan di halaman *headline* merupakan berita yang dianggap penting oleh suatu media. Hal ini dikarenakan, khalayak atau dalam hal ini adalah pembaca berita langsung dapat membaca secara langsung karena letaknya yang berada di halaman paling depan lalu biasanya dilengkapi oleh foto untuk memperjelas berita tersebut.

Pembingkaiian terlebih dahulu melalui proses yaitu mengkonstruksi realitas dengan makna dan bentukan tertentu. Dengan *framing*, dapat diketahui bagaimana sebuah peristiwa dibingkai oleh media. Dan hasilnya sebuah pemberitaan yang memiliki makna dan tujuan tertentu tergantung sudut pandang yang digunakan, sehingga tidak mengherankan apabila ada pemberitaan yang berbeda meskipun berasal dari peristiwa yang sama (Eriyanto, 2002:3). Sebagai contoh penulisan framing milik Felicia Ratih Puspitasari pada 2010 dengan judul ‘Profiling Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Dalam Pemberitaan di Harian Bisnis Indonesia (Analisis Framing Pencitraan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Dalam Pemberitaan di Harian Bisnis Indonesia edisi 1 Desember 2009 - 24 Februari 2010 Terkait Dengan Kasus Bank Century).

Harian Kedaulatan Rakyat, dipilih menjadi obyek penulis karena Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar yang secara historis tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. Selain itu SKH Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar tertua di Jogja dan masih bertahan sampai saat ini. Jumlah tiras SKH Kedaulatan Rakyat juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan surat kabar lokal lainnya, tiras KR sampai September 2010 mencapai 450.000 eksemplar per hari. Dinamisasi politik masyarakat yang begitu tinggi menjadi salah satu sorotan penting bagi Kedaulatan Rakyat. Penulis pun tertarik dengan komitmen Kedaulatan Rakyat untuk “suara hati nurani rakyat” yang dapat diartikan bahwa SKH Kedaulatan Rakyat berkomitmen untuk menyuarakan hati nurani rakyat. Dalam penelitian ini, yang dimaksud hati nurani rakyat Yogyakarta adalah segera disahkannya RUU Keistimewaan Yogyakarta oleh pemerintah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana surat kabar harian Kedaulatan Rakyat yang notabene merupakan surat kabar yang besar di Yogyakarta membingkai sosok Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dalam pemberitaan terkait dengan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY. Sebenarnya penelitian ini

ingin mengetahui bagaimana suatu media memiliki kemampuan untuk membingkai suatu peristiwa, dalam hal ini mencitrakan seorang GBPH Prabukusumo dalam beritanya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian menjadi:

Bagaimanakah Koran Harian Kedaulatan Rakyat membingkai (*frame*) sosok Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo terkait berita pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY?

D. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian digunakan agar penelitian lebih fokus dan terarah. Dalam penulisan ini masalah yang akan dikupas dan diteliti dibatasi pada, pemberitaan pengunduran diri GBPH Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY di SKH Kedaulatan Rakyat

E. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan *frame* media Kedaulatan Rakyat mengenai tokoh Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo terkait berita pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY.
2. Untuk mengetahui apakah SKH Kedaulatan Rakyat tetap konsisten terhadap visi dan misinya yaitu untuk menjadi media yang menyalurkan suara hari nurani rakyat serta menjadi media yang profesional dan objektif dalam memberitakan suatu peristiwa yang bebas dari tekanan kekuasaan pemilik modal dan pemerintah.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dalam bidang *framing* media dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan mahasiswa ilmu komunikasi yang akan terjun di bidang jurnalistik

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kemajuan media cetak dimasa yang akan datang serta dapat memberikan perspektif bagi para pembaca untuk lebih kritis dalam memahami isi media.

G. Kerangka Teori

1. Berita adalah Kontruksi Realitas Sosial

Istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman seperti dikutip Eriyanto dalam *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media* (2002:15). Realitas menurut Berger tidak datang begitu saja tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman ini realitas berwujud ganda/prural. Setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, berdasarkan pengalaman, preferensi, pendidikan, dan lingkungan sosial, yang dimiliki masing-masing individu.

Lebih lanjut gagasan Berger mengenai konteks berita harus dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Setiap wartawan mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda atas suatu peristiwa. Hal ini dapat dilihat bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dalam pemberitaannya.

Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan fakta yang riil. Berita adalah produk interaksi wartawan dengan fakta. Realitas sosial tidak begitu saja menjadi berita tetapi

melalui proses. Diantaranya proses internalisasi dimana wartawan dilanda oleh realitas yang ia amati dan diserap dalam kesadarannya. Kemudian proses selanjutnya adalah eksternalisasi. Dalam proses ini wartawan menceburkan diri dalam memaknai realitas. Hasil dari berita adalah produk dari proses interaksi dan dialektika ini. (Eriyanto,2002:17)

Konstruksi realitas terbentuk bukan hanya dari cara wartawan memandang realitas tapi kehidupan politik tempat media itu berada. Sistem politik yang diterapkan sebuah negara ikut menentukan mekanisme kerja media massa Negara itu mempengaruhi cara media massa tersebut mengkonstruksi realitas. (Hamad, 1999:55)

Menurut Hamad, karena sifat dan faktanya bahwa tugas redaksional media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka tidak berlebihan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan. (Sobur, 2001:98)

Menurut Eriyanto, terdapat dua penekanan karakteristik penting pada pembuatan konstruksi realitas. *Pertama*, pendekatan konstruksi menekankan bagaimana politik pemaknaan dan bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas politik. Makna bukanlah sesuatu yang *absolute*, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. *Kedua*, pendekatan konstruksi memandang kegiatan konstruksi sebagai proses yang terus menerus dan dinamis. Kedua karakteristik ini menekankan bagaimana politik pemaknaan dan bagaimana cara makna tersebut ditampilkan, sebab dalam penekanan tersebut produksi pesan dipandang sebagai '*mirror reality*' yang hanya menampilkan fakta sebagaimana adanya. (Eriyanto, 2002:40)

Menurut De Fleur dan Ball-Rokeach, ada berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan makna, antara lain: mengembangkan kata-kata baku beserta makna asosiasinya; memperluas makna dan istilah-istilah yang ada; mengganti makna lama serta istilah dengan

makna baru; serta menetapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu system bahasa. (Hamad,dkk, 2001:70)

Media menggunakan bahasa yang berbeda-beda dalam membangun kontruksi realitas. Walaupun realitas tersebut mempunyai fakta yang sama. Hal mengkonstruksikan realitas fakta ini tergantung pada kebijakan redaksional yang dilandasi pada politik media itu. Salah satu cara yang bisa dipahami atau digunakan untuk menangkap cara masing-masing media membangun sebuah realitas berita adalah dengan *framing*. (Nugoho,dkk,1999:1)

2. Media Sebagai Agen Pesan

Berita oleh masyarakat umum sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang obyektif karena berita ditulis berdasarkan fakta-fakta yang berhasil direkam oleh pekerja media. Berita yang ditampilkan dan disajikan kepada masyarakat dipandang juga sebagai hasil penyuntingan berita yang mengambil informasi dari berbagai sumber secara apa adanya sehingga media massa dapat berperan sebagai penyebar informasi yang netral dan berimbang. Media dapat bertindak secara obyektif dalam menyampaikan suatu fakta kepada masyarakat pembaca.

Lasswell (dalam Wahyuni, 2000: 10) melihat fungsi media massa terhadap masyarakat pada tataran ideal adalah sebagai berikut:

- a) Media massa berfungsi sebagai pengamat lingkungan, pemberi informasi tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas.
- b) Media massa berfungsi melakukan seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Media massa menyeleksi apa yang pantas dan perlu disiarkan.
- c) Media massa berfungsi sebagai sarana penyampaian nilai dan warisan social budaya dari satu generasi kepada generasi lainnya.

Melihat fungsi-fungsi di atas, maka peran media massa perlu mendapatkan kontrol secara berimbang tanpa harus mematikan kreatifitas pekerja media. Karena itu, media massa harus selektif dalam menampilkan suatu berita atau informasi. Media massa menjalankan fungsi media berita dan penerangan, media pendidikan, media hiburan dan media promosi (De Vito, 1996: 515).

Media massa, dalam hubungannya dengan publik menduduki posisi yang sangat strategis karena beberapa alasan. Pertama, media memiliki kemampuan memfokuskan perhatian, mengarahkan masyarakat agar memberikan perhatian yang lebih intens terhadap suatu persoalan, memperluas wawasan masyarakat dalam rangka membawa masyarakat ke alam yang lebih maju, menumbuhkan aspirasi nasional untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, serta memperluas dialog tentang kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan (Wahyuni, 2000: 7).

Pandangan demikian terlalu ideal dan normatif karena pada kenyataannya media massa tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan pihak-pihak tertentu. Dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran bebas, ia juga subyek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Eriyanto, 2002: 45).

Secara substantif, media massa merupakan alat komunikasi yang menyampaikan informasi dari sumber informasi kepada masyarakat luas sehingga media massa juga menjadi alat yang sangat ampuh untuk membentuk opini publik. Karena itu, tidak menutup kemungkinan, media massa juga menjadi alat bagi pemiliknya atau kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi pihak lain atau masyarakat luas. Secara positif, media massa menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat ke arah yang lebih konstruktif. Secara negatif, media massa dapat menjadi alat pihak-pihak tertentu

untuk mengejar kepentingannya sendiri seperti kekuasaan, pengaruh, kemenangan politik, pembentukan opini yang berpihak pada pihak tertentu dan sebagainya (Sobur, 2004: 29). Di lihat dari posisi ini, media massa tidak dapat bersikap netral.

Media massa dikatakan tidak netral berangkat dari kenyataan bahwa para pelaku media terikat oleh subyektifitas dirinya seperti paradigma berpikir, sudut pandang, wawasan, pergaulan dirinya di tengah masyarakat dan sebagainya. Nilai dan ideologi wartawan selalu melekat dan mempengaruhi proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Lebih dari itu, wartawan telah menjadi partisipan dari kelompok yang ada di masyarakatnya, khususnya kelompok dominan sehingga dalam proses peliputan atau pelaporan senantiasa menunjukkan keberpihakannya pada suatu kelompok (Sobur, 2004: 32-33). Hasilnya, berita-berita yang ditampilkan media massa pasti mencerminkan ideologi wartawan dan kepentingan politik tertentu.

Pandangan di muka memberikan suatu pemahaman bahwa media tidak semata-mata merekam realitas yang terjadi di lingkungannya. Media massa ikut aktif memproduksi makna-makna baru berdasarkan realitas yang telah dimanipulasikan dengan pemilihan kata-kata dan penyusunan kalimat sedemikian rupa berdasarkan keberpihakannya terhadap pihak tertentu. Dalam konteks ini, insan pers baik wartawan, editor, maupun redaktur memiliki peran sangat sentral. Mereka ini tidak dapat dipandang dari sisi profesinya tetapi harus ditempatkan dalam konteks politik dan ideologi tertentu.

Kepentingan pemilik media jelas mempengaruhi netralitas media massa karena pada prakteknya pemilik media sering memanfaatkan media massa yang dimilikinya untuk memperbesar pengaruhnya kepada publik. Orang-orang yang bekerja di dalam medianya, baik sebagai editor, wartawan, reporter, dan sebagainya tentu akan tunduk kepada pemilik media jika tidak ingin keluar dari media tempatnya bekerja.

Bukan hanya oleh pemilik media, media massa juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok penguasa atau orang kuat secara ekonomi untuk mempengaruhi masyarakat dalam melihat suatu realitas. Dalam konteks ini, suatu negara dapat memanfaatkan media massa untuk mengendalikan masyarakatnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media massa tidak bebas dari kepentingan-kepentingan, tidak independen dan selalu terikat dengan realitasnya sehingga pasti terjadi bias berita (Sobur, 2004: 35).

Media massa bukan sekedar hubungan antara pengirim pesan pada satu pihak dengan penerima pada pihak lain. Mengingat media massa tidak bebas dari kepentingan-kepentingan, media juga harus dilihat sebagai produksi dan pertukaran makna yang titik tekannya terletak pada bagaimana pesan atau teks harus berinteraksi dengan orang untuk memproduksi makna berkaitan dengan peran teks dalam konteks sosial (Fiske, 1990: 39). Produksi makna dalam proses produksi berita jelas terlihat dari sisi *framing* yang menekankan pada seleksi dan penonjolan realitas dan interaksinya dengan khalayak pembaca. Makna-makna dalam proses pembuatan berita merupakan konstruksi kepingan-kepingan *framing* yang saling bersinggungan dan membentuk makna tertentu.

Ada beberapa hal, proses dan tahapan yang mempengaruhi sebuah berita yang ditampilkan pada khalayak sehingga menjadi layak dikonsumsi masyarakat. proses produksi berita, antara lain (Eriyanto, 2002:103-117):

a. Rutinitas Berita

Pembagian kerja menjadi bentuk seleksi bagi wartawan. Untuk mengefektifkan kerja wartawan, wartawan dibagi menjadi beberapa bidang, sehingga memudahkan redaksi dalam pembagian kerja untuk sebuah peristiwa yang terjadi dan kemudian dilaporkan. Sehingga jika ada

peristiwa kompleks yang tidak hanya mencakup satu bidang saja, wartawan akan tetap melaporkan peristiwa tersebut sesuai bingkai bidang kerja wartawan.

b. Nilai Berita

Nilai berita menjadi standar dan ukuran bagi wartawan dalam menulis berita. Tidak semua peristiwa dapat menjadi berita, karena hanya peristiwa yang memiliki nilai berita yang layak menjadi berita. Selain itu nilai berita menentukan bagaimana peristiwa itu akan dikemas. Nilai berita, menurut Ashadi Siregar, ada 6 nilai yang merupakan unsur penting suatu berita dikatakan layak (Siregar, 1998: 27), yaitu:

1) *Significance* (penting)

Suatu kejadian atau peristiwa yang apabila diterbitkan akan mempengaruhi pembacanya atau memiliki makna penting bagi pembacanya.

2) *Magnitude* (besar)

Kejadian atau peristiwa yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi khalayak atau kejadian yang menyangkut angka apabila dijumlahkan akan menarik bagi pembaca.

3) *Timeliness* (waktu)

Peristiwa yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan waktu (peristiwa yang baru terjadi atau baru ditemukan).

4) *Proximity* (kedekatan)

Kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kedekatan dengan pembaca. Kedekatan ini dapat berupa kedekatan geografis maupun emosional.

5) *Prominence* (keterkenalan)

Kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan faktor keterkenalan. Bisa berupa orang, tempat maupun benda.

6) *Human Interest* (manusiawi)

Kejadian atau peristiwa yang mengundang unsur manusiawi. Kejadian yang dapat memberikan sentuhan perasaan kepada pembaca.

Semakin peristiwa memiliki nilai berita, maka kemungkinan peristiwa tersebut ditempatkan pada *headline*. Pemberitaan pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat termasuk dalam beberapa unsur *proximity* (kedekatan), *Significance* (penting), dan *prominence* (keterkenalan) karena Prabukusumo merupakan salah satu kerabat Keraton Yogyakarta dan beliau juga memimpin beberapa organisasi masyarakat di Yogyakarta, seperti KONI, AMPI, dsb.

Unsur nilai berita berperan lebih dibanding dengan subyektifitas wartawan, karena subyektifitas wartawan digunakan ketika wartawan membuat berita tersebut.

c. Kategori Berita

Kategori menentukan kontrol kerja. Makna kategori menurut Tuchman (Eriyanto, 2002:111), wartawan atau pembuat berita menggunakan kategori berita untuk menggambarkan peristiwa yang akan digunakan sebagai berita. Menurut Tuchman terdapat lima kategori berita (Eriyanto, 2002:109-110):

- *Hard news* yaitu berita dari suatu peristiwa yang sangat dibatasi oleh waktu sehingga apabila terlambat diberitakan akan kehilangan aktualitasnya.
- *Soft news* yaitu berita dari suatu peristiwa yang menarik dan akan selalu menarik untuk diberitakan tanpa terikat oleh suatu waktu atau *event* lain, sehingga meskipun ditunda pemberitaannya, nilai berita tersebut tidak akan kehilangan aktualitasnya.
- *Spot news* yaitu berita yang masuk dalam kategori *hard news* dari suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksikan.

- *Continuing news* yaitu berita yang masuk dalam kategori *hard news* dari suatu peristiwa yang dapat diprediksikan dan peristiwa tersebut terus berkelanjutan.
- *Developing news* berita yang masuk dalam kategori *hard news* dari suatu peristiwa sebagai bagian dari rangkaian berita sebelumnya.

Media massa saat ini lebih beragam jenisnya baik berupa televisi, radio, tabloid, majalah atau surat kabar. Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama media massa dapat mengangkat suatu isu yang kemudian menjadi wacana publik dalam rangka mempengaruhi pendapat umum.

3. Media Massa dan Ideologi

Media massa mengambil peran penting dalam proses manipulasi-manipulasi dalam rangka memaknai suatu peristiwa sebagai bagian dari kehidupan yang lebih baik atau tidak baik. Berbagai macam manipulasi tidak lepas dari jalinan ide-ide yang terus terkait semakin erat sehingga memperkuat pemaknaan antara satu makna dengan makna yang lain. Madzhab Frankfurt berpendapat bahwa media dimanfaatkan oleh elite masyarakat atau negara untuk mempertahankan dominasinya atas masyarakat. Melalui Media kelas elit memanipulasi simbol-simbol untuk menguntungkan kepentingan kelas yang dominan (Junaedi, 2005: 21).

Menurut James Lull (1997: 2) pemaknaan mempunyai kaitan yang erat dengan ideologi dan hegemoni. Dalam penjelasannya, suatu makna hanya dapat dibentuk dan diusahakan oleh suatu kekuatan yang hegemonik baik dalam hal modal, teknologi, dan intelektual. Pemaknaan tidak pernah netral dari suatu ideologi karena citra berangkat dari ide-ide dari kelompok masyarakat tertentu yang memiliki hegemoni di atas. Pengertian ideologi sendiri dalam konteks ini adalah sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi seperti dikutip berikut ini:

Dalam pengertian yang umum dan fleksibel, ideologi merupakan pikiran yang terorganisir yang menunjukkan nilai-nilai, orientasi dan kecenderungan yang saling melengkapi sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi (Lull, 1997: 1).

Sistem ide-ide pada akhirnya akan membentuk suatu keteraturan sosial, sedangkan keteraturan sosial itu sendiri akan menciptakan atau meneguhkan suatu ideologi. Berbagai perangkat ideologi yang digunakan untuk membuat keteraturan tersebut dikontrol atau dikendalikan oleh kelas dominan melalui institusi pasar dan institusi umum lainnya Althusser dalam (William, 1983: 222).

Althusser (dalam Junaedi, 2005) memberi pengertian bahwa ideologi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sebuah gagasan, namun juga memiliki keberadaannya secara material. Menurut Raymond Williams, ideologi merupakan himpunan ide-ide yang muncul dari seperangkat kepentingan tertentu dari sebuah kelas atau kelompok tertentu (dalam Lull, 1997: 3). Media massa menjadi alat untuk mengangkat dan memperkuat suatu ideologi dengan melegitimasi ide-ide dan mendistribusikannya secara persuasif kepada masyarakat luas. Jalinan ide-ide sebagai turunan atau cerminan dari ideologi terus diperluas dan diperkuat untuk menimbulkan dampak sosial yang semakin luas dan kuat. Media massa dalam kehidupan masyarakat modern yang serba terspesialisasi mempunyai tiga fungsi kultural, yaitu :

- a. Mendistribusikan dan mengkonstruksikan pengetahuan dan imaji sosial sehingga masyarakat dapat merasakan realitas atau kenyataan hidup dari sesuatu yang lain.
- b. Merefleksikan kenyataan dalam pluralitas, untuk menyediakan inventarisasi gaya hidup dan ideologi yang diterima sebagai sesuatu yang obyektif.
- c. Mengorganisasi dan membawa bersama apa yang sudah secara selektif direpresentasikan dan diklasifikasikan. Produksi konsensus dan konstruksi legitimasi tidak semata-mata dilihat dari

hasil jadi artikel atau beritanya saja, tapi juga seluruh proses argumentasi, pertukaran informasi dan debat yang berlangsung melalui media (McQuail, 2000: 154).

4. Framing sebagai sebuah Teori

Framing merupakan cara pandang wartawan dalam melihat suatu peristiwa dan dituliskan dalam berita, dan berita adalah proses produksi dari sebuah rangkaian proses framing. Framing dalam hal ini bukan sebagai metode analisis teks, melainkan sebagai sebuah teori. Seperti yang ditulis diatas bahwa framing adalah suatu cara wartawan dalam menulis suatu berita, bagaimana suatu realitas atau peristiwa ditampilkan dalam sebuah berita oleh media. Bagaimana sebuah media memandang dan membingkai berita, bagian mana yang akan ditekankan dan ditonjolkan, pembedaan ini melalui proses konstruksi.

Menurut Berger dan Lukman, Analisis framing merupakan metode untuk melihat cara bercerita (*histori telling*) media atas suatu peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” tema dan realitas yang dijadikan berita. Analisa framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas (aktor, kelompok, atau apa saja) dikonstruksi oleh media (Eriyanto, 2002:3). Analisa framing memiliki dua konsep yakni konsep psikologis dan sosiologis. Konsep psikologis lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi pada dirinya sedangkan konsep sosiologis lebih melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas realitas.

Dalam proses komunikasi, *frame* memegang peranan penting. *Frame* merupakan cara melihat bagaimana menseleksi dan memberi penonjolan pemahaman atas peristiwa, bagaimana peristiwa dipahami dan sebab suatu masalah dan bagaimana masalah diselesaikan.

Gamson dan Modigliani, penulis yang konsisten mengimplementasikan konsep framing, menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (*package*) yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan (Eriyanto, 2002: 217-287). Menurut mereka, *frame* adalah cara

bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Kemasan (*package*) adalah serangkaian ide-ide yang menunjukkan isu apa yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan. *Package* adalah semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. *Package* tersebut dibayangkan sebagai wadah atau struktur data yang terorganisir sejumlah informasi yang menunjukkan posisi atau kecenderungan politik, dan yang membantu komunikator untuk menjelaskan muatan-muatan di balik suatu isu atau peristiwa.

Keberadaan suatu *package* terlihat dari adanya gagasan sentral yang kemudian didukung oleh perangkat-perangkat wacana seperti kata, kalimat, pemakaian gambar atau grafik tertentu atau proposisi dan sebagainya, awalnya elemen dan struktur wacana tersebut mengarah pada ide tertentu dan mendukung ide sentral suatu berita.

Proses pemberitaan dalam organisasi media akan sangat mempengaruhi *frame* berita yang akan diproduksinya. *Frame* yang diproses dalam organisasi media tidak lepas dari latar belakang pendidikan wartawan sampai ideologi institusi media tersebut.

Dalam proses komunikasi, *frame* mempunyai peranan penting, dapat dilihat sebagai berikut:

Tahap	Frame
Proses Komunikator	Bagaimana seseorang mengkonstruksi peristiwa, membingkai pesan tertentu. Secara sadar atau tidak sadar komunikator memproduksi frame ketika berkomunikasi

Kedua: Teks/ Isi	Isi teks komunikasi baik eksplisit maupun implisit mempunyai perangkat frame tertentu. Hal ini ditandai dengan pemakaian label dan metafora tertentu dalam pesan, baik pada level tematik maupun pendukungnya.
Ketiga: Penerima (receiver)	Penerima bukan pihak yang pasif menerima begitu saja pesan yang datang kepadanya. Sebaliknya, ia menggunakan kerangka penafsiran untuk menafsirkan pesan yang datang-sehingga bias jadi bingkai yang diberikan oleh penerima berbeda dengan bingkai yang diberikan oleh komunikator.
Keempat: Masyarakat	Masyarakat juga menyediakan frame tertentu berupa perspektif bagaimana peristiwa dipahami. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adalah bahan yang siap sedia dipakai oleh anggota komunitasnya untuk menafsirkan pesan

Tabel I.1 Tabel tahap Proses Framing (Eriyanto, 2002: 292)

Analisis *framing* secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui realitas peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja yang dibingkai oleh suatu media. Pembingkaiannya tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Melalui analisis inilah realitas dikonstruksikan dengan makna tertentu, bagaimana media memahami dan memaknai realitas dan dengan cara apa realitas itu ditandakan bukan apakah media itu memberikan titik perhatian yang negatif dan

positif, karenanya terdapat dua esensi utama dari *framing*. Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai hal ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat dan gambar untuk mendukung gagasan (Eriyanto, 2002: 3).

Proses pembentukan dan konstruksi berita itu, hasil karyanya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dipahami, akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek- aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek- aspek yang tidak disajikan secara menonjol bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan khalayak. *Framing* adalah sebuah cara bagaimana sebuah peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu dan membesarkan cara bercerita tertentu dari realitas atau peristiwa. *Framing* mencirikan kerja para jurnalis untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan informasi secara cepat dan menyampaikan secara cepat kepada para pembaca. Kegiatan *framing* merupakan kegiatan seleksi dan penekanan isu. Penyeleksian dilakukan pada beberapa aspek dari realitas dan membuat lebih penting dalam sebuah teks. Kegiatan dan penekanan isu berperan dalam penyelesaian dan pemahaman definisi dari suatu masalah dan mampu memberi interpretasi sebab akibat dari suatu permasalahan (Eriyanto, 2002: 66-70).

Untuk menganalisis teks berita, penulis menggunakan analisis framing dengan model Pan dan Kosicki. Dalam model ini sebuah pesan dibuat lebih menonjol, ada bagian pesan yang lebih ditonjolkan dibanding bagian lain sehingga pembaca tertuju pada pesan yang ditonjolkan. Menurut Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki menyebutkan bahwa konsepsi *framing* saling berkaitan yaitu konsepsi psikologi dan konsepsi sosiologi (Pan dan Kosicki dalam Eriyanto, 2002: 252-253). *Framing* dalam konsepsi psikologi menekankan bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya dan berkaitan dengan struktur dan proses kognitif,

bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditujukan dalam skema tertentu. Sedangkan dalam konsepsi sosiologis menekankan seseorang melihat dan bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Berita dalam model ini dianggap sebagai pusat dari organisasi ide, sehingga ide ini dihubungkan dengan elemen yang berbeda dengan teks berita didalam teks secara keseluruhan (Eriyanto, 2002: 254-255)

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Moleong (2004:4) mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut dengan utuh (*holistic*).

Sama halnya dengan Denzin dan Lincoln (1987) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif (Lexy Moleong, 2004 hal 5), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang ada dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap isi berita serta wawancara.

Fenomena dalam penelitian ini adalah sikap SKH Kedaulatan Rakyat terhadap pengunduran diri GBPH Prabukusumo dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY. Untuk memahami dan menafsirkan fenomena tersebut, peneliti akan menggunakan analisis framing model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki pada level teks dan akan dibantu dengan wawancara untuk memahami konteks.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penelitian adalah berita seputar pengunduran diri Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dari Partai Demokrat diberitakan oleh Kedaulatan Rakyat. Berita ini digunakan untuk mengetahui bagaimana SKH Kedaulatan Rakyat membingkai sosok GBPH Prabukusumo terkait pengunduran dirinya dari Partai Demokrat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, terdapat dua level yaitu level teks dan konteks. Analisis framing tidak hanya meneliti teks saja namun juga membutuhkan konteks untuk mengetahui bagaimana frame media dalam memberitakan tentang sosok GBPH Prabukusumo terkait pengunduran dirinya dari Partai Demokrat.

a) Level Teks

Pada level ini peneliti hanya meneliti mengenai teks berita untuk mengetahui penonjolan dan penyembunyian suatu fakta akan dapat diketahui melalui pemilihan kata, pembentukan kalimat, *lead*, hubungan antar kalimat, foto, grafik, dan perangkat lain yang dapat digunakan untuk menimbulkan penafsiran yang diinginkan kepada khalayak.

Pada level teks ini, peneliti menggunakan perangkat framing Pan dan Kosicki yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan etoris untuk meneliti isi teks berita. Berita yang dipilih oleh peneliti untuk objek penelitian adalah berita pada SKH Kedaulatan Rakyat edisi 5-13 Desember 2010. Edisi ini dipilih karena pada edisi tersebut, SKH Kedaulatan Rakyat banyak membahas pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat.

Adapun berita yang diteliti yaitu:

- 1) Edisi Minggu 5 Desember 2010 dengan judul ” **Prabukusumo Siap Mundur Dari Demokrat Jika...**”

- 2) Edisi Kamis 9 Desember 2010 dengan judul ” **Menjaga Harkat dan Martabat Sultan HB IX Prabukusumo Mundur dari PD**”
- 3) Edisi Jum’at 10 Desember 2010 dengan judul ” **Soal RUUK, DPRD DIY Ajak Rakyat Ikut Sidang Terbuka Kerabat Keraton Satu Suara**”
- 4) Edisi Minggu 12 Desember 2010 dengan judul ”**KELUARNYA GBPH PRABUKUSUMO DARI PD ANAS MENYESALKAN, TAPI MENGHORMATI**“
- 5) Edisi Senin 13 Desember 2010 dengan judul ” **ANGELINA SONDAKH GANTIKAN PRABUKUSUMO Sejumlah Kader PD DIY Kecewa**”

b) Level Konteks

Dalam analisis framing, peneliti tidak hanya meneliti bagian teksnya saja, namun hal yang juga penting adalah konteks. Konteks dirasa penting sebab teks diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Konteks ini berisi latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Guy Cook dalam Eriyanto (2001:8), mengatakan bahwa konteks memasukkan semua situasi yang berada di luar teks yang mempengaruhi penggunaan bahasa dalam teks dan mempengaruhi situasi dimana teks tersebut diproduksi. Ada banyak konteks yang berada diluar teks, namun tidak semua konteks dimasukkan dalam analisis, hanya yang berpengaruh dengan produksi teks dan penafsiran teks yang digunakan dalam analisis. Eriyanto, dalam Analisis Wacana (2010:10) mengatakan ada beberapa konteks yang berpengaruh besar dalam produksi teks, yaitu : *pertama*, partisipan wacana, latar siapa yang memproduksi wacana (jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, dan agama). *Kedua*, *setting* sosial tertentu (tempat pembuatan teks privat atau

publik, dalam suasana formal atau informal) hal ini penting karena pada ruang tertentu memberikan wacana tertentu pula.

Pada level ini, peneliti menggali informasi mengenai hal-hal yang mempengaruhi pembuatan teks yang berkaitan dengan pemberitaan pengunduran diri GBPH Prabukusumo dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY, dengan wawancara dengan wartawan SKH Kedaualatan Rakyat.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, keduanya saling melengkapi. Data primer dalam penelitian ini yaitu teks berita seputar pengunduran diri Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dari Partai Demokrat di koran Kedaualatan Rakyat. Selain teks, data primer yang lain adalah hasil wawancara, yang akan digunakan untuk menganalisis konteks.

Sedangkan data sekunder, sebagai data pendukung penelitian, peneliti banyak menggunakan sumber elektronik diantaranya berita mengenai pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat yang terdapat di internet.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *framing* model Pan (Zhongdan Pan) dan Kosicki (Gerald M Kosicki). Metode analisis *framing* yaitu bagaimana realitas atau peristiwa dibingkai oleh media dalam konstruksi tertentu. Atau dengan kata lain, adalah metode untuk melihat cara berita (*story telling*) media atas suatu peristiwa.

Adapun fungsi framing dalam suatu berita adalah untuk mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab timbulnya masalah, memberikan penilaian moral, dan memberikan saran maupun pembenaran terhadap suatu peristiwa (Sobur, 2004: 182). Untuk menghasilkan

framing yang baik, teknik *framing* harus memperhatikan fungsi-fungsi di atas. Dalam model *framing* milik Pan dan Kosicki, *framing* didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan tertentu lebih menonjol dalam sebuah teks. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Sintaksis

Dalam pengertian umum sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat. Struktur sintaksis secara sederhana digunakan untuk memahami skema berita secara utuh, biasanya ditandai oleh struktur piramida terbalik dan oleh aturan-aturan atribut (penandaan) sumber. Piramida terbalik ini mengacu pada pengorganisasian bagian-bagian struktur yang runtut, seperti *headline*, *lead*, latar informasi, pemilihan narasumber, kutipan sumber, pernyataan, dan bagian penutup berita yang mampu menunjukkan arah pembingkai media.

. Struktur sintaksis dapat memberikan petunjuk bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak ke mana berita tersebut akan di bawa (Nugroho, 1999).

Kita dapat pula menganalisis objektivitas dan netralitas suatu pemberitaan media dari struktur sintaksis. Objektivitas pemberitaan media memiliki tiga unsur pokok unsur kebenaran, unsur kebenaran, unsur keseimbangan serta relevansi judul dengan isi berita. Hal lain yang dapat dilihat dari struktur sintaksis adalah netralitas pemberitaan. Artinya ada komposisi seimbang antara narasumber yang pro dengan ide atau fakta yang diangkat dan yang kontra dengan tema berita yang disajikan, serta yang netral atau tidak berpihak.

b. Skrip

Melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meliputi pertanyaan, *apa, kapan, siapa, berapa, dimana* dan *bagaimana*.

Dengan penghilangan salah satu dari enam kelengkapan berita tersebut, wartawan mampu menekankan atau menghilangkan bagian terpenting dalam mengisahkan sebuah fakta. Penghilangan suatu berita dalam menguraikan sebuah peristiwa juga dapat mengakibatkan pemberitaan menjadi tidak *fair* (Zen, 2004:110-111). Penonjolan unsur-unsur tertentu dari kelengkapan berita inilah yang akan memberi makna lain pada suatu berita. Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita: bagaimana suatu peristiwa dengan urutan tertentu di pahami dengan cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu.

c. Tematik

Struktur tematik berkaitan dengan bagaimana suatu fakta di tulis ini membuktikan tema tertentu yang di pilih wartawan dalam melaporkan berita lewat susunan atau bentuk kalimat tertentu. Bagi Pan Kosicki berita mirip pengujian hipotesis : peristiwa yang diungkapkan dan perangkat tersebut digunakan untuk membuat dukungan yang logis bagi hipotesis yang di buat.

Perangkat tematik adalah sebagai berikut:

- a) Detail: berhubungan dengan pengendalian informasi yang di untungkan Komunikator. Informasi yang menguntungkan diri komunikator akan di tampilkan lebih besar. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan mendapat porsi yang lebih sedikit atau di hilangkan sama sekali.
- b) Bentuk Kalimat: berhubungan dengan cara berpikir logis yaitu prinsip kausalitas. Kausalitas dalam bahasa di wujudkan dalam subyek dan predikat.
- c) Kata ganti: dapat menunjukkan posisi seseorang dalam suatu wacana. Bertujuan untuk memanipulasi dengan menciptakan imajinasi.
- d) Koherensi: menyangkut pertalian atau jalinan antar kata, proposisi, atau kalimat. Dua buah kailimat yang menggambarkan fakta berbeda di hubungkan dengan menggunakan koherensi.

Fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi berhubungan ketika seorang wartawan menghubungkannya. Ada beberapa macam koherensi. Pertama, koherensi sebab akibat, yang memandang proposisi atau kalimat satu sebagai akibat atau sebab dari kalimat lain. Kedua, koherensi penjelas, yang memandang proposisi atau kalimat satu sebagai penjelas, yang memandang proposisi atau kalimat satu sebagai penjelas dari kalimat lain. Ketiga, koherensi pembeda, yang memandang proposisi atau kalimat satu sebagai lawan atau kebalikan dari kalimat lain.

d. Retoris

Retorika (*rhetoric*) memiliki beragam definisi Whately misalnya, mendefinisikan retorika dengan *the finding of suitable arguments to prove a given point, and the skillful arrangement of them* (Van Dijk, 1997: 157). Namun pada prinsipnya ada dua hal yang selalu berkaitan dengan istilah retorika Pertama, aktivitas sering di gunakan dalam wilayah politik. Kedua, retorika juga di lihat sebagai wacana yang cukup di perhitungkan dalam mempengaruhi khalayak. Dalam hal ini struktur retorik di maksudkan sebagai komponen yang di gunakan para wartawan untuk menekankan fakta yang di berikan.

Struktur retorik dalam wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang di pilih wartawan untuk menekankan arti yang di tonjolkan oleh wartawan. Berfungsi untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi-sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran yang di inginkan pada suatu berita. Struktur retorik juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang di sampaikan tersebut adalah suatu kebenaran.

Elemen struktur retorik yang di pakai adalah :

a) Leksikon

Merupakan pemilihan atau pemakaian kata-kata tertentu untuk menggambarkan peristiwa. Pilihan ini tidak dilakukan secara kebetulan, tetapi secara ideologis.

b) Methapora

Kiasan yang mempunyai persamaan sifat dengan benda atau hal yang bisa dinyatakan dengan kata atau frasa. Dipakai tidak hanya untuk 'ornamen' berita, tetapi juga untuk mendukung dan menekankan pesan utama yang disampaikan.

c) Grafis

Diwujudkan dalam bentuk variasi huruf (ukuran, warna, dan efek), *caption*, grafik, gambar, tabel, foto, dan data lainnya. Termasuk juga penempatan dan ukuran judul (dalam kolom). Elemen grafik memberikan efek kognitif, ia mengontrol perhatian dan ketertarikan secara intensif dan menunjukkan apakah suatu informasi itu dianggap penting dan menarik sehingga harus difokuskan.

d) Gaya

Menunjukkan pada kemasan bahasa tertentu dalam penyampaian pesan untuk menimbulkan efek tertentu pada khalayak.

Analisis *framing* model Pan dan Kosicki menempatkan setiap bagian dari struktur berita yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retorik sebagai perangkat *framing*. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a) Mengamati *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan bagian penutup berita.
- b) Melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis yang meliputi pertanyaan *apa, kapan, siapa, berapa, dimana* dan *bagaimana*.

- c) Membaca detail, bentuk kalimat, kata ganti dan koherensi. Oleh karena itu, unit dalam berita yang harus dicermati adalah pada setiap paragraph dan proposisi di dalamnya.
- d) Melihat leksikon, metafor, grafis dan gaya untuk memberikan tekanan pada makna tertentu.

Penokohan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dalam koran Kedaulatan Rakyat pada periode penelitian merupakan konstruksi media terhadap realitas yaitu tentang sosok Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo. Penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang fakta-fakta penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu (Moh. Nazir, 1983: 687).

